

BAB III

PEMBAHASAN

Realitas yang berkembang dan terjadi setiap saat, setiap hari dalam kehidupan masyarakat merupakan sesuatu atau obyek yang menarik untuk selalu dikupas dan kemudian diolah menjadi sebuah berita.

Realitas ini beragam dengan jumlah yang relatif banyak sehingga memungkinkan media massa untuk selalu atau setiap saat menulis pemberitaan berbagai bidang/hal kehidupan masyarakat. Baik kehidupan masyarakat sebagai hasil karyanya maupun kehidupan masyarakat sebagai akibat dari musibah atau bencana alam seperti halnya musibah gempa yang terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2006 di kawasan DIY dan Jawa Tengah. Pusat gempa ada di kawasan selatan Kabupaten Bantul sehingga kerusakan/korban gempa di kawasan ini lebih besar dan lebih berat dari kawasan lain di DIY seperti kawasan kota Yogyakarta dan kawasan kabupaten Sleman. Dengan demikian wajar bila penanganan korban gempa di kabupaten Bantul juga lebih berat dan lebih banyak persoalan/masalahnya. Salah satu masalah penanganan korban gempa yang berkembang dan menjadi perhatian banyak pihak, bahkan menjadi perhatian media massa adalah pengelolaan pencairan bantuan dana rekonstruksi. Ada dua titik perhatian dalam masalah pengelolaan pencairan bantuan dana rekonstruksi ini yang menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat, pemerintahan dan khususnya pemberitaan media massa yaitu proses pencairan dan cara pembagian dana bantuan rekonstruksi yang kemudian mengerucut pada dua titik permasalahan yaitu, masalah harapan masyarakat yang tidak terpenuhi/terpuaskan

dan masalah kinerja pemerintah yang dinilai lamban. Unjuk rasa masyarakat korban gempa muncul dan marak berkembang yang mengindikasikan tidak terpenuhinya harapan atau ketidakpuasan masyarakat dalam pencairan bantuan dana rekonstruksi. Masalah ini menjadi lebih rumit atau pelik apabila berkembang menjadi pemicu konflik dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Dari sudut pandang media massa khususnya media massa lokal, realitas ini cukup menarik untuk menjadi bahan pemberitaan dengan kemungkinan beragam pemaknaannya. Hal ini tidak terlepas dari beragamnya cara pandang media massa yang mungkin juga tidak terlepas dari latar belakang kehidupan media itu sendiri baik intramedia maupun ekstramedia. Dengan demikian adalah wajar bila terlihat beragamnya sikap media dalam menjalankan fungsi media khususnya fungsi kontrol dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Demikian pula halnya dengan media lokal yaitu Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Bernas Jogja dengan latar belakang sejarah perkembangan kelembagaan masing-masing dalam memaknai/mensikapi masalah pencairan bantuan dana rekonstruksi untuk korban gempa.

Latar belakang sejarah perkembangan kelembagaan dua media lokal tersebut pada akhirnya akan memunculkan intramedia dan ekstramedia yang selanjutnya akan berpengaruh dalam proses pemberitaan khususnya pemberitaan mengenai masalah pencairan bantuan dana rekonstruksi. Untuk mengungkap perbedaan pemberitaan dua media lokal ini maka dilakukan analisis perbedaan tersebut melalui proses analisis framing model Robert N Entman.

A. Pemberitaan Masalah Pencairan Bantuan Dana Rekonstruksi Oleh Harian Kedaulatan Rakyat Dan Harian Bernas Jogja

Sebagai objek penelitian peneliti mengambil berita pada tanggal 20 Agustus hingga 30 September 2006. Namun setelah dilakukan seleksi dan pemilahan akhirnya penulis memutuskan mengambil berita yang diturunkan pada tanggal 20, 23, dan 29 Agustus serta berita pada tanggal 7 September 2006 pada Harian Umum KR. Sedangkan untuk Harian Pagi Bemas Jogja penulis juga mengambil berita yang dimuat pada hari dan tanggal yang sama kecuali tanggal 19 Agustus 2006, dikarenakan tanggal 20 Agustus tidak ada berita mengenai seputar dana rekonstruksi korban gempa.

Berita-berita tersebut dipilih karena mewakili kondisi yang ada di tengah masyarakat saat itu terkait penyaluran dana rekonstruksi. Dilihat secara keseluruhan, berita yang mengangkat soal penyaluran dana rekonstruksi memang sangatlah banyak. Bahkan berita-berita tersebut selalu menghiasi halaman KR maupun Bemas. Tidak saja di halaman depan, namun juga di halaman dalam yang memuat penyaluran dana tersebut di 4 Kabupaten/Kota di Yogyakarta.

Delapan berita yang dianalisis di sini merupakan berita pilihan yang dianggap berita yang cukup representatif mewakili keadaan di tengah masyarakat. Berita itu juga yang jelas menunjukkan kentalnya arah ideologi kedua media tertua di daerah istimewa ini.

Hanya saja, selain memiliki kesamaan tema, ada beberapa berita tertentu yang peneliti nilai tidak lengkap. Sehingga objektivitas berita tersebut peneliti nilai tidak cukup.

Seperti disebutkan dalam latar belakang persoalan penelitian ini sebelumnya, penelitian dilakukan untuk mengetahui frame kedua media tertua di DIY dalam memberitakan penyaluran dana rekonstruksi. Persoalan pencairan dana rekonstruksi menjadi isu yang sangat krusial. Sebab, setelah tiga bulan gempa berlalu, pencairan dana rekonstruksi yang dijanjikan pemerintah tak kunjung menemui kejelasan.

Sebaran sajian berita penanganan korban gempa dua harian ini khususnya pada periode bulan Agustus-September 2006 memang berbeda. Sebagai gambaran berikut ini disajikan proporsi sebaran berita penanganan korban gempa pada periode tersebut.

Tabel II
Proporsi berita Penanganan Korban Gempa Pada Harian Kedaulatan Rakyat dan Bernas Jogja Periode Agustus-September 2006

Macam Berita Penanganan Korban gempa	Kedaulatan Rakyat				Bernas Jogja			
	Agusts	Septmbr	Total	%	Agusts	Septmbr	Total	%
Pemerintah	13	15	28	52,9%	14	11	25	78,9%
Masyarakat Korban gempa	14	11	25	47,1%	3	4	7	21,1%
Jumlah	27	26	53	100%	17	15	32	100%

Tabel ini menunjukkan adanya kecenderungan titik perhatian yang berbeda diantara dua harian yang diteliti. Harian Kedaulatan Rakyat memberikan perhatian yang relatif seimbang untuk berita tentang pemerintah maupun masyarakat korban gempa sedangkan, Harian Bernas Jogja cenderung lebih mengutamakan perhatian kepada kinerja pemerintah. Kapasitas penyajian berita pada dua harian tersebut juga berbeda, dengan kecenderungan Harian kedaulatan Rakyat mempunyai kapasitas penyajian lebih besar.

Perbedaan kapasitas pemberitaan ini mungkin berkait dengan masalah keorganisasian perusahaan media. Berikut ini disajikan struktur organisasi dan periklanan dua perusahaan media tersebut.

Table III
Struktur Organisasi Perusahaan Media
Harian Kedaulatan Rakyat dan Bernas Jogja

Organisasi	Kedaulatan Rakyat	Bernas Jogja
Komisaris	Komisaris Utama	-
Direksi	Direktur utama Direktur keuangan Direktur Pemasaran Direktur Produksi Direktur Litbang	Direktur Utama Direktur
Redaksi	Pemimpin umum Pemimpin Redaksi/penanggung jawab Wakil Pemimpin Redaksi Redaktur Pelaksana Manager Litbang Diklat redaksi Manager Produksi Redaksi Redaktur Ka Biro: Semarang, Jakarta, Surakarta, Purwokerto, Kedu Utara, Kedu Selatan, Kulon progo, Klaten & boyolali, Gunung Kidul Fotografer Sekretaris Redaksi Wartawan (7 orang)	Pemimpin Umum Redaktur Senior Redaktur pelaksana Wakil redaktur pelaksana Redaktur Asisten Redaktur Staf Redaksi Perwakilan redaksi: Klaten, Temanggung, Kebumen, Jakarta
Pimpinan Perusahaan	Pemimpin Perusahaan Kepala TU langganan Manager Iklan Perwakilan dan Biro Kuasa Direksi	Pemimpin Perusahaan Sekretaris Koorperat Manager Iklan Manager Sirkulasi Manager PSDM/Umum Manager Keuangan
Tarif langganan	Rp 65.000,00/bulan	Rp 40.000,00/bulan
Periklanan: Iklan umum Iklan Keluarga Iklan baris Iklan satu kolom Iklan khusus Iklan warna Iklan kuping Iklan Halaman Iklan Halaman Terakhir Advertorial Hitam putih	Rp. 19.000/mm klm Rp. 10.000/mm klm Rp. 11.000/baris Rp. 10.000/mm klm Rp. 175.000/ukuran 1klm x 45mm Rp. 35.000/mm klm 500% dari tarif 300% dari tarif 200% dari tarif	Rp 6000/mmk Rp 6000/baris Rp 6000/mmk Rp 22.000 & Rp 12.000 Rp 9000

Advertorial Berwarna		Rp18000
Alamat Redaksi Percetakan	Jl. P Mangkubumi Yk Percetakan Kedaulatan Rakyat	Jl. IKIP PGRI Sonosewu Yk PT. Muria baru Offset Yogyakarta

B. Frame KR: Harapan Masyarakat tentang kepastian dan keadilan pencairan

Dana Rekonstruksi

Setelah Aceh dilanda bencana tsunami yang maha dahsyat, kini giliran daerah Istimewa Yogyakarta yang dilanda gempa bumi. Gempa berkekuatan 5,9 SR yang datang tiba-tiba ini merenggut ribuan korban jiwa dan puluhan ribu korban luka serta kerugian yang tak ternilai.

KR menurunkan berita peristiwa tersebut keesokan harinya. Berita mengenai jatuhnya korban jiwa dan kerugian masyarakat akibat peristiwa ini terus berlanjut setiap hari. Demikian pula saat muncul polemik soal pencairan dana rekonstruksi KR juga menurunkannya. Sejak polemik itu muncul, KR terus membuat berita lanjutan (running) keesokan harinya. Tidak tanggung-tanggung, KR selalu menempatkan berita yang berkaitan dengan dana rekonstruksi sebagai headline (HL) di halaman muka (halaman 1).

KR menyajikan berita soal dana rekonstruksi dengan gaya yang khas. Meski berita yang mereka turunkan masuk dalam kategori hard news, namun koran ini banyak mengedepankan kondisi riil korban gempa dalam tulisan awalnya. Kondisi masyarakat dijadikan justifikasi betapa dana rekonstruksi yang dijanjikan pemerintah sangat mereka butuhkan. Dalam hal bantuan dana rekonstruksi ini masyarakat mengharapkan agar pemerintah mampu mengelola dengan baik dalam arti proses pencairan lebih cepat dan cara pembagian adil merata. Masyarakat mengharapkan

proses pembagian bantuan dana rekonstruksi tersebut dengan cara yang mereka kehendaki yaitu “bagi rata” artinya setiap korban gempa memperoleh jumlah bantuan dengan nilai yang sama. Dengan demikian sebenarnya masyarakat menunjukkan kerangka berpikir tentang harapan kepastian dan keadilan dalam proses pencairan bantuan dana rekonstruksi. Namun demikian pada kenyataannya banyak masalah yang berkembang dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan dana rekonstruksi, misalnya muncul masalah ketidakpastian pencairan dana dan cara pembagian bantuan dana bertahap disesuaikan dengan rencana pemerintah. Dengan demikian terjadi ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan langkah-langkah kebijakan pemerintah sehingga dalam kalangan masyarakat korban gempa muncul rasa tidak puas (ketidakpuasan) yang ditunjukkan dengan perilaku unjuk rasa. Secara rinci hal ini dapat diidentifikasi dengan menggunakan empat elemen analisis framing.

Define problem. Sebagai koran lokal DIY yang eksis berkat kedekatannya dengan masyarakat, KR kembali menunjukkannya dalam posisi itu dalam berita-berita mereka pasca gempa bumi. KR melihat kondisi masyarakat yang begitu memprihatinkan. Korban gempa yang kehilangan segalanya sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah berupa dana rekonstruksi. Namun kebutuhan masyarakat yang begitu mendesak harus tertunda karena dana rekonstruksi yang mereka harapkan belum juga turun. Padahal masyarakat menaruh harapan besar agar dana bantuan ini bisa segera cair dengan cara pembagian merata (bagirata).

Pada berita tanggal yang diturunkan KR 20 Agustus 2006, pada paragraf ketiga KR menulis;

“Dari pantauan KR di berbagai lokasi, Sabtu (19/8) banyak warga yang masih di tenda-tenda darurat maupun yang telah menempati rumah sementara berharap bisa

secepatnya mendapat bantuan dana rekonstruksi. Menurut beberapa warga yang rumahnya roboh, bantuan dana rekonstruksi merupakan harapan terakhir mereka untuk bisa secepatnya membangun rumahnya dalam jangka waktu dekat ini.”³⁸

Untuk menunjukkan permasalahan yang berkembang di kalangan korban gempa tentang kebutuhan dana rekonstruksi beritanya, KR memuat kutipan langsung hasil wawancara dengan salah seorang warga;

“Sampai saat ini kami masih bingung mau berbuat apa. Terlebih kami juga belum bekerja. Jadi meski telah dibangun rumah sementara, tetap berharap pemerintah membangun rumah warga yang roboh,” tutur salah seorang warga yang telah dibangun rumah sederhana oleh swasta di Pleret Bantul.³⁹

Masyarakat sangat mengharapkan bantuan dana rekonstruksi karena mereka dalam keadaan bingung dan tidak mampu untuk melakukan perbaikan tempat tinggal. Mereka mengungkapkan pikiran dan perasaan serta harapan yang berkembang selama ini dengan tetap menjaga kebersamaan untuk mencegah konflik.

Pada berita tanggal 23 Agustus 2006 dalam berita berjudul ‘Korban Gempa Tuntut Dibagi Rata’ yang diturunkan KR menulis;

“Koordinator Lapangan pengunjuk rasa Suparji menyatakan, masyarakat korban gempa ingin bangkit bersama-sama. Karena mereka juga dulu merasakan gempa dan menjadi korban secara bersama-sama pula. Untuk itu, dana rekon-rehab itu pun mereka nilai lebih tepat dan adil jika dibagi rata,”⁴⁰

Harapan masyarakat secara lebih tajam diungkapkan dalam kegiatan unjuk rasa. Mereka mengungkapkan pikiran, perasaan dan harapan dengan pernyataan *“dana rekon-rehab itu pun mereka nilai lebih tepat dan adil jika dibagi rata”*.

Usulan ini menunjukkan adanya permasalahan yang berkembang dalam masyarakat

korban gempa dalam bentuk ketidakpuasan mengenai cara pembagian dana rekonstruksi.

Menko Kesra Aburizal Bakrie menyatakan agar dana rekonstruksi sesegera mungkin dicairkan secara bertahap. Pernyataan ini mengindikasikan adanya masalah pengurusan/administrasi pencairan dana yang tersendat. Sebenarnya pernyataan ini sekaligus teguran pada Pemda DIY selanjutnya Aburizal Bakrie menegaskan dengan pernyataan sebagai berikut;

“Tetapi menurut informasi yang saya terima, sampai sekarang dana sebesar 30 persen itu belum pernah dipakai. Sayang *kan*? Makanya pemerintah daerah suruh pakai *dhuwit* itu. Masak *dhuwit* ditaruh di bank,” ujar Aburizal Bakrie.⁴¹

Ical, sapaan Aburizal memastikan dana rekonstruksi akan diberikan secara bertahap. Skema pembagiannya adalah 30-40-30. berikut kutipan statemen Ical;

“Sudah dikasih, pakai dulu yang pertama. Kalau yang tahap pertama saja belum dipakai, buat apa diberi tahap kedua dan ketiga? Sebagaimana membangun rumah, kan selalu dimulai dari fondasi, tiang, dan sebagainya. DIPA yang sudah diberikan saat ini sebesar 30 persen, kemudian nanti akan diberikan 40 persen dan terakhir 30 persen lagi. Kan anggaran untuk korban gempa di DIY dan Jateng juga sudah masuk APBN Tambahan 2006 dan APBN 2007. Itu sudah masuk,” jelas Ical.⁴²

Pernyataan tersebut memeberikan gambaran tentang kesimpangsiuran dana rekonstruksi yang belum tersalurkan seperti yang direncanakan. pernyataan ini memicu reaksi ketersinggungan emosi/perasaan warga yang dapat dilihat pada potongan berita tersebut berikut ini:

“Demo lagi;...menyikapi belum adanya kepastian kucuran dana rekonstruksi dari Pemprop DIY kepada korban gempa, warga yang tergabung dalam Gabungan Posko Rakyat dengan didampingi sejumlah LSM kembali menggelar demo di Kepatihan Yogyakarta.” (29 Agustus 2006)

Ketiga berita tersebut, memberikan gambaran tentang reaksi warga dalam bentuk unjuk rasa yang menggambarkan adanya masalah ketidakpuasan. Hal ini diungkapkan dengan unjuk rasa untuk mensikapi belum adanya kepastian pencairan dana dengan tuntutan yang sama. Dalam penderitaan menanti terwujudnya harapan, masyarakat mengorganisasi diri dalam satu forum untuk memperkuat penyampaian aspirasi.

“Tuntutan para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Rakyat Korban Bencana (Forkob) ini masih tetap sama dengan dengan tuntutan-tuntutan sebelumnya, yakni mendesak agar dana rekonstruksi segera dibagikan kepada masyarakat mengingat musim hujan akan segera tiba, sedang tenda-tenda yang ada sekarang sudah mulai jebol. Mereka juga menuntut agar pembagian dilakukan secara merata, tidak berdasarkan prioritas yang membutuhkan dulu atas masyarakat miskin dulu” .(KR tanggal 7 september 2006)

Rasa tidak puas dari masyarakat korban gempa tentang pengelolaan dana rekonstruksi mereka tunjukkan lagi dengan unjuk rasa karena yang mereka harapkan belum terwujud. Mereka menuntut agar dana rekonstruksi segera dibagikan secara merata. Hal ini menunjukkan adanya rasa tidak puas (ketidakpuasan) masyarakat korban gempa tentang pengelolaan dana rekonstruksi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Harian Kedaulatan Rakyat pilihan definisi masalahnya adalah sebenarnya ada pada sisi masyarakat yaitu ketidakpuasan dalam kebingungan yang ditunjukkan oleh sikap tidak puas terhadap ketidaksesuaian cara pembagian dana rekonstruksi dengan harapan masyarakat (bagi rata) dan ketidakpastian pencairan dana.

Diagnose Cause. Pemberitaan dalam harian Kedaulatan Rakyat tertanggal 20, 23, 29 Agustus, dan 7 September 2006 juga menunjukkan faktor sebab dari masalah yang didefinisikan

Belum adanya kepastian pencairan dana rekonstruksi oleh pemerintah membuat masyarakat semakin menderita. Bantuan dari pihak LSM memang terus mengalir namun itu tidak cukup dan tidak merata. Masyarakat tetap berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Begitu juga dengan Musiyem, warga RT 4 Dusun Kedaton Kidul Pleret yang baru akan dibangun rumah oleh pihak swasta. Ia berharap bantuan pembangunan rumah dari pemerintah bisa segera diterimanya. Saat ini dia masih menempati rumah gubuk di samping rumahnya yang roboh akibat gempa, sambil menunggu pihak swasta yang berjanji akan segera membangun rumahnya kembali.⁴³”

Pernyataan *“berharap bantuan pembangunan rumah dari pemerintah bisa segera diterimanya”* ini menunjukkan belum adanya kepastian pencairan dana sehingga masyarakat masih tetap menunggu.

Namun, Gubernur DIY Sri Sultan HB X berkilah bahwa dana yang akan disalurkan kepada korban gempa adalah dana pemerintah pusat. Namun demikian, pihaknya/Pemda DIY tetap berupaya memenuhi segala ketentuan yang digariskan oleh pusat.

“Jika tidak sesuai aturan yang berlaku, kita harus siap-siap masuk Wirogunan (LP Wirogunan-Red). Karena itu kita juga harus menyiapkan sistem manajemen dan administrasinya. Adanya pendamping itu juga untuk mempertanggungjawabkan rumah yang bapak-bapak bangun tahan gempa, entah bentuknya seperti apa yang penting tahan gempa. Sebab syarat penggunaan dana DIPA harus seperti itu. Kalau tidak sesuai aturan, kami tidak bisa mencairkannya,” tegas Sultan.⁴⁴”

Pernyataan *“Karena itu kita juga harus menyiapkan sistem manajemen dan administrasinya”* ini menunjukkan belum adanya kesiapan pemerintah yang juga berarti belum ada kepastian dalam pencairan dana rekonstruksi

Berita tanggal 29 Agustus 2006 tentang pernyataan Aburizal Bakrie justru berbeda karena menyebutkan bahwa dana rekontruksi untuk korban gempa sudah diberikan pemerintah namun masih ditangan pemerintah daerah. Dia menegaskan, jika dana rekonstruksi untuk tahap pertama tidak segera dicairkan maka dana tahapan berikutnya dipastikan tidak akan cair.

Berita KR tanggal 7 September menyebutkan pernyataan Kepala Dinas Kimpraswil DIY Tri Harjun Ismaji tentang pencairan dana rekonstruksi tergantung cepat atau tidaknya pengajuan rencana kerja oleh Kelompok Masyarakat atau Pokmas.

“Tri Harjun menegaskan, cepat-lambatnya pencairan dana tergantung cepat-lambatnya kelompok masyarakat (pokmas) mengajukan usulan kegiatan atau rencana kerja sebagaimana yang menjadi syarat pencairan dana rekonstruksi, yaitu untuk membangun rumah tahan gempa secara bertahap. (KR, 07/09/2006).

Hal ini juga menunjukkan ketidakpastian langkah pemerintah dalam pencairan dana rekonstuksi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pilihan penyebab (diagnose causes) Harian Kedaulatan Rakyat adalah pemerintah lemah dan lamban yang ditunjukkan oleh ketidaksiapan, ketidakpastian, dan ketidaksesuaian langkah pemerintah dalam pencairan dana rekonstruksi dengan harapan masyarakat. Kondisi inilah yang menimbulkan atau menjadi penyebab munculnya/berkembangnya ketidakpuasan masyarakat dalam pencairan bantuan dana rekonstruksi yang kemudian diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa.

Make Moral Judgement. Pada prinsipnya potongan berita harian KR dari tanggal 20, 23, 29 Agustus, 7 september 2006 menunjukkan bahwa pemerintah

belum mampu melaksanakan pengelolaan dana rekonstruksi sebagaimana program maupun yang diharapkan oleh masyarakat baik dari sisi kepastian pencairan dan cara pembagian dana rekonstruksi.

Berita KR tanggal 20 agustus 2006 membenarkan mengenai adanya ketidakpastian pemerintah dalam pencairan dana rekonstruksi dan besarnya harapan masyarakat adanya bantuan dana tersebut.

“Terkait rencana pemerintah yang akan segera mengucurkan dana rekonstruksi rumah, ia mengaku belum mendengar kabar tersebut.”Sampai saat ini pak dukuh belum memberitahukan apapun. Kalau tidak dibantu pemerintah, mungkin sepuluh tahun mendatang juga belum tentu bisa membangun”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Dukuh Telem, Trimulyo, Jetis Sarmidi yang tersebutkan pada potongan berita pada tanggal yang sama.

“Ia melihat bantuan-bantuan yan diberikan oleh pihak non pemerintah seperti saling berlomba. Di wilayahnya setiap rumah warga yang rusak mendapatkan 14 lembar triplek dan 12 lembarseng dari sebuah lembaga swadaya masyarakat. Di pedukuhan lain LSM lain memberikan bantuan berupa rumah.”kelihatannya saling bersaing memberi bantuan tapi tidak apa apa karena warga jadi terbantu”

Pernyataan Dukuh Guyangan Zainudin memperkuat pernyataan Sarmidi tentang adanya bantuan dari pihak lain/non pemerintah walaupun tidak merata.

“Saya bingung mau mencari donatur mana yang bersedia membangunkan rumah untuk warga. Minimal untuk mereka yang punya balita dan lansia,” katanya.⁴⁵

Ulasan beberapa berita tersebut menunjukkan bahwa dalam penanganan korban gempa belum terlihat secara cepat dan tepat langkah-langkah dari pemerintah sehingga menimbulkan kesan kelangkaan peran pemerintah yang kemudian tergantikan oleh langkah-langkah pihak non pemerintah. Pengakuan masyarakat bahwa mereka belum menerima bantuan dan bahkan belum mengetahui perihal

bantuan, memberikan gambaran bahwa masalah tersendatnya pelaksanaan program pemerintah ini memang terjadi. Walaupun ada bantuan dari pihak non pemerintah dengan segala latar belakang kepentingannya, bantuan pemerintah tetap mereka harapkan.

Masyarakat selalau menjaga kebersamaan dalam mensikapi kebijakan/cara pengelolaan dana rekonstruksi oleh pemerintah khususnya mengenai syarat dana pendampingan.

“Intinya, kami menolak adanya dana pendampingan untuk program rekonstruksi dan rehabilitasi. Kami juga belum bisa menerima jika sistem pembagian dananya dilakukan bertahap dan memprioritaskan masyarakat miskin atau yang sangat membutuhkan. Kami menuntut agar dana itu dibagi rata. Kalau yang miskin mendapat duluan sedang yang kaya belakangan, nanti justru memicu konflik di masyarakat,” kata Suparji. (KR, 23/08/2006).

Berita KR ini juga memuat kutipan langsung statemen Suparji.

“Kami tidak ingin terpecah belah, kami ingin tetap bersatu menghadapi kehidupan. Karena itulah, kami juga membawa sapu sada atau sapu lidi sebagai lambang persatuan rakyat yang tidak bisa terpatahkan. Karena itu kami juga ingin bangkit bersama-sama,” tandas Suparji. (23 Agustus 2006)

Dua potongan berita ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sikap kebersamaan masyarakat dalam menyatakan menyampaikan harapan. Hal ini juga memberikan dukungan argumentasi pembenaran terhadap pilihan definisi masalah dan penyebab yang diperkirakan.

“Karena itu, informasi yang sampai saat ini dipegang pemprop DIY adalah sebagaimana yang mengemuka dalam pidato presiden 16 Agustus, yaitu tahap pertama Rp1,2 triliun, kedua Rp 1,5 triliun dan ketiga Rp 2,7 triliun. Meski demikian Pemprop DIY juga tidak berani menilainya hal itu sebagai kepastian, karena belum dalam bentuk DIPA yang diserahkan ke daerah. Dari tahap pertama sebesar Rp 1,2 trilliun itu sendiri, DIY mendapatkan 749 miliar dan Jateng sekitar Rp 451 miliar.” (KR tanggal 29 Agustus 2006)

Pernyataan ini juga menunjukkan kesan hati-hati pemerintah dalam menyampaikan pernyataan tentang langkah dalam pencairan bantuan dana rekonstruksi. Lebih-lebih unjuk rasa masyarakat korban gempa terus berlanjut.

“Demo masyarakat korban gempa bumi di DIY yang menuntut segera dibagikannya dana rekonstruksi dengan cara dibagi rata(bagi rata) dan tanpa menggunakan dana pendampingan kembali berlangsung,rabu (6/9)”

“Merasa kurang puas terhadap hasil pembicaraan dengan bupati Bantul, para pengunjukrasa dengan menumpang truk berbondong-bondong menuju Kantor Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan Yogyakarta”

Berdasarkan ulasan-ulasan berita tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian moral Harian Kedaulatan Rakyat adalah masyarakat masih menjaga kebersamaan/mencegah konflik dalam penyelesaian dana rekonstruksi dengan harapan pemerintah segera memperbaiki langkah-langkahnya.

Treatment Recommendation. KR menilai setiap korban gempa tetap layak mendapatkan bantuan dana rekonstruksi yang dijanjikan pemerintah. Bantuan dana rekonstruksi dinilai sebagai hak korban gempa. Tidak saja bagi mereka yang belum mendapatkan bantuan apa pun, namun mereka yang juga sudah mendapatkan bantuan dari pihak swasta. Bahkan warga yang sudah membangun rumahnya kembali dengan dana sendiri pun dinilai tetap berhak atas dana rekonstruksi.

Wakil ketua DPRD DIY Gandung Pardiman yang menganggap bahwa gerakan masyarakat perlu direspon positif. Apalagi karena dana yang akan digunakan untuk rehab rekon juga tersedia. Sehingga tidak ada lagi pilihan bagi pemerintah selain segera mencairkannya

Sekda Bantul Gendut Sudarto memperkuat pernyataan ini dengan menyebutkan bahwa bagi korban gempa yang sudah memiliki atau mendapat bantuan rumah

sementara tetap bisa memperoleh dana rekonstruksi. Demikian pula dengan warga yang sudah membangun rumahnya kembali dengan dana sendiri. Dengan catatan konstruksi bangunan rumah tahan gempa.

“Tapi jika rumah permanen yang dibangun dengan swadaya tidak dengan konstruksi tahan gempa, maka kemungkinan tidak akan mendapat bantuan dana rekonstruksi,” kata Sekda Bantul Gedut Sudarto.⁴⁶

Potongan berita ini menyebutkan ide rekomendasi bantuan dana rekonstruksi yang disertai persyaratan tertentu dengan ungkapan “*jika tidak dengan konstruksi tahan gempa kemungkinan tidak akan mendapat bantuan*” yang disebutkan dalam pernyataan Sekda Bantul.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan kemungkinan memberikan persetujuan cara pembagian bantuan dana rekonstruksi dengan mekanisme bagi rata sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan kutipan KR tentang pernyataan Sultan:

“Tapi jika masyarakat menghendaki dibagi rata saja, ya *mangga*. Silahkan saja. Yang penting nanti kalau warga yang sudah mampu membangun rumahnya sendiri masih juga mendapat bantuan fondasi, sementara yang miskin baru bisa membangun fondasi saja dan masih tetap tinggal di tenda, jangan salahkan saya. Sebab saya yakin juga, yang *gedhe* itu pasti menang *kerahé*. *Sing cilik mesthi kalah*,” ucap Sultan.⁴⁷

Potongan berita ini menyebutkan ide rekomendasi bantuan dana rekonstruksi yang disertai persyaratan disampaikan Sultan disertai nasehat agar masyarakat berhati-hati menerapkan kesepakatan tersebut agar tidak terjadi konflik.

Berdasarkan ulasan tentang potongan berita tersebut dapat disimpulkan bahwa pilihan rekomendasi Harian Kedaulatan Rakyat adalah percepatan pencairan dana

dan pola bagi rata dalam pemanfaatan, dengan harapan pemerintah bersikap akomodatif terhadap aspirasi masyarakat.

C. Frame Harian Bernas Jogja: Pencairan Dana Rekonstruksi Lamban

Seperti halnya Harian Kedaulatan Rakyat, Harian Bernas Jogja yang menjadi salah satu surat kabar tertua di daerah ini juga menurunkan berita seputar dana rekonstruksi secara umum di halaman depan edisi Jogjakarta. Pemuatan di halaman ini cukup masuk akal. Hal ini mengingat Bernas Jogja memang terbagi dalam dua bagian. Satu bagian merupakan berita nasional sedangkan bagian lain secara penuh meliput berita daerah.

Berita yang diturunkan Bernas Jogja sekilas memiliki kemiripan dengan berita yang dimuat di KR. Namun jika diteliti lebih dalam konstruksi berita yang dibangun dan disajikan kepada publik jelas memiliki perbedaaan yang cukup mencolok. Dalam hal ini Bernas cenderung lebih menitikberatkan pada berita seputar perilaku pemerintah dalam penanganan korban gempa, khususnya mengenai pencairan bantuan dana rekonstruksi. Pemberitaan Bernas pada kurun waktu itu memberikan kesan seolah ada langkah lamban pemerintah dalam menangani pencairan bantuan dana rekostruksi. Ini terungkap dalam analsis framing berikut ini.

Define Problems. Dalam beritanya, Bernas Jogja menunjukkan betapa lambatnya pengurusan proses administrasi oleh pemerintah setempat dalam menangani korban gempa. Dibandingkan dengan Jawa Tengah (Jateng) DIY kalah jauh. Pada saat itu pemerintah Daerah Jateng telah melakukan tender untuk konsultan manajemen pelaksanaan tahapan penanganan korban gempa tersebut, sedangkan

Pemerintah Daerah DIY masih melakukan inventarisasi data korban gempa yang akan diberi bantuan dana rekonstruksi.

“menurut Sekretaris Tim Teknis Nasional Rehabilitasi Rekonstruksi Wilayah Pascagempa Bumi Provinsi DIY dan Jateng, Dr Danang Parikesit di Jogja, Jumat (18/8), revisi daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penunjukkan kuasa pengguna anggaran DIPA untuk keperluan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dan Jateng telah dikirimkan oleh Dirjen Perbendaharaan kepada kedua gubernur pada 9 Agustus.”⁴⁸

Potongan berita ini tidak menyebutkan perkembangan di wilayah DIY sehingga memberikan kesan bahwa perkembangan proses penanganan korban gempa lebih cepat terjadi di wilayah Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan revisi daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) perlu dilakukan. Demikian pula penunjukkan kuasa pengguna anggaran DIPA perlu dilaksanakan.

Empat hari berikutnya, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2006 Bernas kembali menurunkan berita dengan nada yang sama.. Pada berita yang diturunkan di halaman depan Bernas mengangkat isu tidak akan cairnya DIPA sebesar Rp749 miliar jika tidak ada dana pendampingan. Sementara itu masyarakat menolak adanya dana pendampingan tahapan rekonstruksi.

Bernas menulis statemen Gubernur DIY Sri Sultan HB X;

“Pendamping mutlak harus ada untuk laporan ke pemerintah pusat. Kalau tidak ada pendamping maka *duit* itu tidak bisa keluar. Untuk bisa mencairkan Rp749 miliar harus ada ketentuan tahan gempa,” ujar Gubernur.⁴⁹

Potongan berita ini memberikan kesan bahwa langkah pemerintah dalam penanganan bantuan dana rekonstruksi tersendat oleh masalah dana pendampingan dan ketentuan bangunan tahan gempa. Sementara itu masyarakat terkesan menolak dana pendampingan. Dengan demikian wajar bila penanganan bantuan dana

mas cetak 19 Agustus 2006
mas cetak 23 Agustus 2006

rekonstruksi oleh pemerintah terkesan lamban. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan Gubernur DIY bahwa kalau tidak ada pendamping maka duit itu tidak bisa keluar dan disertai ketentuan bangunan tahan gempa.

Lambatnya pencairan dana rekonstruksi, selain karena penolakan dana pendampingan, juga terjadi karena persoalan teknis. Pemerintah daerah terkesan lama menyimpan dana rekonstruksi sebesar Rp749 yang sebenarnya sudah dicairkan pemerintah pusat.

Jika dana yang ada di Bank tidak segera dicairkan, maka dana rekonstruksi untuk tahapan berikutnya dipastikan tidak akan diberikan pemerintah pusat. Bernas mengutip pernyataan Menko Kesra Aburizal Bakrie sebagai berikut;

“Sudah dikasih, pakai dulu yang pertama. Kalau yang pertama belum dipakai, buat apa yang kedua dan ketiga. Kan membangun itu selalu dari fondasi ke tiang dan sebagainya, kan diberikan 30 persen, 40 persen, nanti 30 persen lagi.”⁵⁰

Potongan berita ini menunjukkan kesan bahwa Pemda DIY belum memanfaatkan dana awal yang sudah diberikan sehingga dapat dikatakan lamban dalam penanganan korban gempa.

Tanggal 7 September 2006, Bernas menurunkan berita yang menggambarkan semakin carut marutnya pencairan dana rekonstruksi. Massa dari Kabupaten Bantul dan sekitarnya kembali turun kejalan menuntut agar dana rekonstruksi yang menjadi hak mereka segera dicairkan. Tidak hanya mendatangi kantor bupati, mereka juga mendatangi Kepatihan karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Bernas menulis di paragraf pertama berita mereka hari itu:

“Potret penanganan pascagempa di DIY semakin suram. Demo para korban gempa seperti tiada henti. Rabu (6/9), ribuan orang yang menamakan diri Forum Rakyat Korban Gempa (Forkob) yang berasal dari Pundong, Pleret, Bambanglipuro, dan kecamatan lain di Bantul melancarkan aksi demo di kantor Bupati Bantul, Rabu (6/9) pagi.⁵¹

Hal ini juga menunjukkan kesan bahwa pemerintah lamban dalam menangani korban gempa. Ini ditunjukkan oleh kalimat awal yang digunakan Bernas Jogja yang menunjukkan penanganan pasca gempa oleh pemerintah tidak seperti yang diharapkan masyarakat dengan kata “semakin suram” , padahal isi berita ini sebenarnya adalah mengenai unjuk rasa dari para korban gempa.

Dari ulasan pemberitaan Bernas tersebut dapat disimpulkan bahwa pilihan definisi masalah Harian Bernas Jogja adalah kelambanan pemerintah dalam pencairan dana rekonstruksi.

Diagnose Causes. Dalam pandangan Bernas, lambannya rekonstruksi karena Pemerintah Daerah DIY terkesan kurang mampu dalam administrasi tahapan-tahapan yang dibutuhkan. Misalnya DIY hingga sejauh ini masih dalam tahap inventarisasi data korban gempa yang akan dibangun rumah. Sementara itu di daerah tetangga, Jawa Tengah pemerintah setempat sudah mulai melakukan tender untuk konsultan pelaksana tahap rekonstruksi. Padahal, yang bertanggung jawab memproses tahapan rekonstruksi adalah pemerintah setempat. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui DIPA sementara proses pencairannya akan dilakukan pemerintah lokal. Revisi DIPA sendiri sudah dikirimkan kepada kedua Gubernur sejak tanggal 9 Agustus. Tetapi Pemerintah Daerah Jawa Tengah lebih cepat proses adminitrasinya sehingga lebih cepat pula memperoleh anggaran dana rekontruksi.

Pernyataan lanjut Sekretaris Tim Teknis Nasional Rehabilitasi Rekonstruksi Wilayah Pascagempa Bumi Provinsi DIY dan Jateng Danang Parikesit tentang kesigapan /kecepatan proses penanganan bantuan dana rekonstruksi oleh Pemda Jawa Tengah memperkuat kesan tersebut.

“Dengan demikian tim pelaksana tidak lagi memiliki kendala administratif dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang disiapkan oleh tim pelaksana maupun satuan kerja yang telah ditetapkan,” katanya⁵². (Bemas, 19/08/06).

Potongan berita tersebut memberikan kesan bahwa kemampuan administrasi penanganan korban gempa di Jawa Tengah lebih baik dari di DIY

Tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga disebut turut memberi andil lambannya pencairan dana rekonstruksi. Melalui regulasi yang mengharuskan adanya dana pendampingan, dana sebesar Rp749 semakin lama dicairkan. Pasalnya masyarakat menolak adanya dana tersebut.

Bemas menulis;

“Pendamping mutlak harus ada untuk laporan ke pemerintah pusat. Kalau tidak ada pendamping maka *duit* itu tidak bisa keluar. Untuk bisa mencairkan Rp 749 miliar harus ada ketentuan tahan gempa,” ujar Gubernur tatkala menerima seribu warga korban gempa, Selasa (22/8). Di Bangsal Kepatihan”⁵³

Potongan berita ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah seolah mengembalikan persoalan pencairan dana rekons kepada pemerintah pusat yang telah membuat aturan. Bantuan dana itu hanya bisa cair jika ada dana untuk program pendampingan yang pelaksanaannya oleh pemerintah pusat diharuskan melalui proses tender. Kenyataan bahwa muncul penolakan di tengah masyarakat membuat pemerintah daerah tak bisa berbuat banyak selain menuruti regulasi jika ingin dana

itu cair. Dengan demikian timbul kesan ketidakmampuan administrasi pada Pemerintah Daerah. Ini ditunjukkan oleh ungkapan yang disebutkan dalam pernyataan gubernur yaitu *"kalau tidak ada pendamping maka duit itu tidak bisa keluar"* jadi persyaratan administrasi tetap merupakan masalah yang menyebabkan tersendatnya langkah pencairan dana rekonstruksi.

Meski begitu inti masalah tetap ada di tangan pemerintah. Pernyataan Aburizal Bakrie selaku Menko Kesra menunjukkan betapa lambatnya pencairan dana rekonstruksi.

"Kan uangnya sudah diberikan. Makanya pemerintah daerah suruh pakai, gitu. Masak duit ditaruh di bank," ujarnya.⁵⁴

Potongan berita ini menunjukkan masalah administrasi penanganan bantuan dana rekonstruksi yang ditunjukkan oleh ungkapan Ical *"Masak duit ditaruh di bank"*.

Pada berita lain Bernas menggambarkan kesan kekecewaan masyarakat karena tidak dipercaya oleh pemerintah dalam pemanfaatan dana rekonstruksi. Artinya ada kemungkinan masyarakat menggunakan bantuan dana tersebut untuk keperluan yang lain. Oleh karena itu pemerintah menekankan persyaratan pendampingan dalam program penanganan korban gempa

"Mereka juga kecewa dengan pemerintah yang seolah tidak percaya bahwa warga akan benar-benar menggunakan dana untuk pembangunan rumah sehingga pemerintah merasa perlu memberikan pendampingan dalam proses rekonstruksi rumah tersebut".⁵⁵

Potongan berita ini menunjukkan rasa kecewa masyarakat terhadap ketidakpercayaan pemerintah dalam pemanfaatan dana rekonstruksi.

Bernas cetak 29 Agustus 2006
Bernas 7 September 2006

Berdasarkan beberapa ulasan berita tersebut Harian Bernas Jogja memberikan pilihan penyebab (diagnose causes) pada ketidakmampuan administrasi Pemerintah Daerah DIY dalam mempersiapkan penanganan dan pelaksanaan pencairan dana bantuan rekonstruksi merupakan sebab yang diperkirakan menimbulkan masalah kelambanan pencairan dana rekonstruksi.

Make Moral Judgement. Rekonstruksi menjadi kata yang sangat sensitif bagi masyarakat korban gempa. Hilangnya harta benda dan nyawa orang-orang terkasih membuat para korban tak punya pilihan lain selain berharap bantuan. Tidak hanya dari pihak swasta, namun terpenting bantuan dari pemerintah sebagai tanggung jawab kepada rakyatnya.

Sebenarnya pemerintah khususnya Pemda DIY tetap menunjukkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan penanganan korban gempa sebagaimana program yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan keinginan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan Gubernur DIY berikut ini.

“Tentang dana pendampingan, Gubernur mengaku sempat ngotot ke pemerintah pusat supaya beban tersebut untuk masyarakat bukan untuk biro konsultan yang harus dilelang. “Konsultan pendamping arep dilelang regane pira? Kapan rampunge?”.⁵⁶

Rasa tanggung jawab Pemda DIY ditunjukkan oleh langkah gubernur untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat korban gempa lebih diperhatikan dengan mempertanyakan regulasi lelang untuk program pendampingan. Ini ditunjukkan oleh ungkapan yang disebutkan dalam pernyataan Gubernur, “*Konsultan pendamping arep dilelang regane pira?*”

Pemerintah pusat juga menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam penanganan korban gempa ini dengan memberikan teguran kepada Pemda agar segera menyelesaikan proses administrasi. Ini ditunjukkan oleh pernyataan Menko Kesra yang tertulis dalam potongan berita berikut ini.

“Menteri Koordinator (Menko) Kesra, Aburizal Bakrie mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY agar segera menggunakan dana Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahap 1 Rp 749 miliar, Dana itu jangan justru berlama-lama disimpan di bank.”⁵⁷

Dalam potongan berita ini tersurat teguran dari pemerintah pusat agar Pemerintah Daerah segera menyelesaikan proses administrasi pencairan dana.

Dari beberapa ulasan potongan berita tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian moral Harian Bernas Jogja adalah adanya rasa tanggung jawab dari pemerintah untuk memperbaiki langkah-langkah administratif sehingga dapat menyelesaikan penanganan korban gempa khususnya mengenai pencairan dana rekonstruksi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Treatment Recommendation. Mengingat nasib jutaan warga yang menjadi korban gempa ada di tangan pemerintah, maka tidak ada lagi pilihan selain segera memproses tahapan yang seharusnya dilakukan. Masyarakat ingin agar mereka segera terbebas dari segala kesusahan. Mereka ingin segera kembali hidup layak, hidup seperti sebelum adanya gempa.

Namun tidak ada yang bisa membuat mereka segera bangkit. Rekonstruksi yang akan dilakukan pemerintah bisa membantu mereka mendapatkan kembali tempat tinggal yang layak. Bisa mendapatkan kembali kehidupan meski tak akan sama persis seperti sebelum gempa menimpa mereka. Namun setidaknya jika

tahapan-tahapan rekonstruksi diproses dengan cepan harapan kembali bisa hidup normal bisa segera terwujud.

Aksi unjuk rasa yang terjadi berulang-ulang memberikan indikasi serius jika dana rekonstruksi memang sangat dinanti masyarakat. Namun demikian dalam unjuk rasa masyarakat juga memberikan pernyataan-pernyataan tentang pilihan pemecahan masalah berdasarkan kearifan yang mereka miliki. Jika bantuan dana rekonstruksi sudah cair, pemerintah dapat memberikan dukungan persetujuan cara penggunaannya selaras dengan keinginan/kesepakatan masyarakat sekaligus juga untuk menghindari konflik. Berikut ini Bemas menuliskan berita pernyataan masyarakat sebagai berikut;

“konsep bagito dalam penilaian FKKJ dimungkinkan bisa meminimalkan konflik karena warga yang rumahnya ambruk seluruhnya akan mendapat bantuan beski dalam jumlah kecil. Sasaran bantuan adalah warga korban gempa yang tidak punya kemampuan untuk membangun rumah mereka kembali dan belum mendapat bantuan rumah dari pihak manapun”.⁵⁸

Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk berlama-lama melakukan rekonstruksi. Jika revisi DIPA sudah dikirimkan maka pemerintah setempat bisa melangkah lebih jauh seperti yang sudah dilakukan di daerah lain jug terkena gempa.

“Bemas 23 Agustus 2006 “Menurut kami konsep dibagi rata (bagito) berdasarkan alokasi total anggaran yang tertuang dalam DIPA sebesar Rp749 miliar lebih realitis dan tidak rawan konflik, sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pengprov Jawa Tengah,” kata Koordinator Umum Forum Kebangkitan dan Kemandirian Jogja (FKKJ) Nanang Ismuhartoyo.⁵⁹

Ternyata masyarakat memang tidak hanya mengharapkan sesuatu tapi juga menunjukkan pilihan pemecahan masalah administrasi dengan contoh seperti yang dilakukan di Jawa tengah. Demikian pula pemerintah, memberikan pilihan dalam

penyelesaian masalah korban gempa khususnya pemanfaatan dana rekonstruksi. Hal ini dikemukakan Gubernur DIY untuk pelaksanaan program pendampingan agar bermanfaat bagi masyarakat korban gempa dengan ide-ide sederhana/praktis tentang program pendampingan.

“Gubernur mengatakan, perkara pendamping nantinya dibayar dengan upah standard Upah Minimum Regional (UMR) namun keberadaan mereka sifatnya penting.” *Ha nek gelem UMR kenapa kudu dhuwur Rp 1,2 juta*”. Kemarin bantuan Rp 1,2 juta itu bantuan dari UGM waktu KKN. *Lha* sifatnya ini *kan* pendampingan. Yang penting saya ingin *duit* pendampingan jangan terlalu besar. Syukur *nek ra* digaji.”

“Sedangkan di Jogja cukup teman-teman mahasiswa mungkin bisa. Logika saya *kan* lebih murah. Tapi nek apa-apa dilelang kayak proyek, *lha nek* kaya ngene rakyat oleh supermi pejabat oleh kijang, bagi saya itu bukan cara yang baik untuk menolong warga,” katanya⁶⁰

Dalam dua potongan berita tersebut tertulis ide sederhana dari Gubernur DIY tentang prinsip murah tapi menyelesaikan masalah. Ini ditunjukkan oleh ungkapan “*Yang penting saya ingin duit pendampingan jangan terlalu besar*” dan “*di Jogja cukup teman-teman mahasiswa*” dalam pernyataan Gubernur tersebut.

Khusus mengenai persoalan waktu dan cara pencairan dana masyarakat memberikan usulan agar secepatnya dana tersebut dicairkan dengan cara *bagi rata*. mereka mengharapkan agar pemerintah mempertimbangkan usulan ini.

“Suharti, seorang wanita berjilbab asal dusun Cepoko, desa tirenggo, menuntut agar realisasi pembagian dana bisa dilakukan secepatnya karena masih banyak warga yang masih tinggal di tenda selama 100 hari pasca gempa.”

“Dalam percakapan di telpon tersebut bupati bantul juga menyetujui keinginan warga untuk membagi rata dana tersebut, namun dengan konsekwensi semua warga, baik itu miskin, sedang, bahkan kaya, akan mendapat bagian yang rata”⁶¹

Berdasarkan ulasan beberapa potongan berita tersebut dapat disimpulkan bahwa Harian Bernas Jogja memberikan pilihan rekomendasi pemecahan masalah pada pemerintah untuk memperbaiki cara kerja administrasi dan menyederhanakan program pendampingan dalam penanganan program pencairan dana rekonstruksi serta mempertimbangkan keinginan cara *bagirata* dari masyarakat.

D. Perbandingan Frame Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Bernas Jogja

Pemberitaan soal pencairan dana rekons menjadi topik yang hangat untuk dua Koran local, dan Harian Bernas Jogja. Namun kedua media ini memiliki sudut pandang yang berbeda mengangkat tema untuk masalah ini.

Harian Kedaulatan Rakyat lebih mengangkat isu rekonstruksi dari sudut korban gempa. Dalam beberapa berita yang diturunkan di halaman muka misalnya, Harian Kedaulatan Rakyat selalu memulainya dengan kalimat yang menggambarkan perkembangan korban gempa baik dari sisi perilaku maupun dari sisi kondisi. Judul seperti '*tenda mulai jebol, dana belum cair,*' '*dana rekonstruksi tetap diharap*' dan '*korban gempauntut dibagi rata,*' jelas menyiratkan hal ini. Sebagai Koran terbesar di DIY, Harian Kedaulatan Rakyat menunjukkan empati yang lebih besar terhadap kondisi yang dialami warga. Media lokal ini lebih memperhatikan ketidaksiapan, ketidakpastian dan ketidaksesuaian langkah pemerintah dalam pengelolaan bantuan dana rekonstruksi dengan harapan masyarakat sebagai latar belakang munculnya unjuk rasa merupakan masalah yang perlu diangkat dalam pemberitaan.

Harian Bernas Jogja yang memosisikan diri sebagai koran modern lebih menyoroti peristiwa ini dari sudut perkembangan kinerja pemerintah dalam

penanganan korban gempa khususnya mengenai pencairan bantuan dana rekonstruksi. Dari berita yang diturunkan pada umumnya media lokal ini lebih mengutamakan pemberitaan mengenai sikap dan perilaku pemerintah. Dengan demikian Bernas ingin menunjukkan posisi fungsi kontrol langkah pemerintah dalam proses pencairan dana rekonstruksi. Isu-isu dari sisi pemerintah menjadi pilihan koran ini sebagai titik perhatian berita. Aksi warga yang terus menuntut kejelasan rekonstruksi juga ditempatkan sebagai wujud kontrol terhadap kinerja pemerintah disamping sebagai wujud aspirasi masyarakat.

Perihal perbedaan sudut pandang dua media lokal ini dapat dilihat dari perbandingan frame yang tercantum dalam tabel III berikut ini:

Table III
Perbandingan frame antara Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Bernas Jogja:

Elemen frame	Kedaulatan Rakyat	Bernas Jogja
<i>Define Problems</i>	Ketidakpuasan warga dalam program pencairan dana rekonstruksi baik tentang kepastian maupun cara pembagiannya.	Kelambanan pemerintah dalam penanganan program pencairan dana rekonstruksi baik mengenai kepastian maupun cara pembagiannya
<i>Diagnose Causes</i>	Pemerintah lemah dan lamban dalam penanganan program pencairan dana rekonstruksi baik dari sisi administrasi, kepastian, dan cara pembagiannya	Ketidakmampuan administrasi pemerintah dalam menyiapkan program pencairan dana rekonstruksi baik dari sisi waktu maupun dari sisi cara pembagiannya.
<i>Make Moral Judgement</i>	Walaupun tidak puas, masyarakat masih menjaga kebersamaan/mencegah konflik dalam penyelesaian dana rekonstruksi	Dalam kondisi kelambanan karena ketidakmampuan administrasi, pemerintah masih menunjukkan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan program

		pencairan dana rekonstruksi
<i>Treatment Recomendastion</i>	Masyarakat menghendaki percepatan pencairan dana dan bagi rata dalam pemanfaatan. Pemerintah bersikap akomodatif	Pemerintah memperbaiki cara kerja administrasi dan menyederhanakan program pendampingan dalam penanganan program pencairan dana rekonstruksi serta mempertimbangkan keinginan carabagirata darimasyarakat

E. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan frame pemberitaan Harian

Kedaulatan Rakyat dan Harian Bernas Jogja

Hasil analisis framing ,menunjukkan bahwa ada perbedaan cara pandang pada dua media ini mengenai masalah pengelolaan bantuan dana rekonstruksi. Harian Kedaulatan Rakyat memandang masalah tersebut dari sisi kondisi/ perilaku masyarakat korban gempa yang relatif berimbang dengan dari sisi kinerja pemerintah sedangkan Harian bernas Jogja memandang masalah tersebut dari sisi kinerja pemerintah. Jika Harian Kedaulatan Rakyat memposisikan ketidakpuasan yang diindikasikan dengan unjuk rasa sebagai pilihan masalah maka Harian Bernas Jogja memposisikan kinerja pemerintah yang lamban sebagai pilhan masalah. Hal ini tidak lepas dari pengaruh kondisi organisasi perusahaan medianya sehingga mempunyai cara pandang yang berbeda.

Fungsi media massa dalam sebuah kehidupan masyarakat atau komunitas tertentu idealnya adalah sebuah sarana akses informasi mengenai isu-isu terkini yang hadir dalam ruang lingkup sebuah masyarakat atau komunitas tertentu pula

Berita yang disajikan media, pada dasarnya adalah akumulasi dari pengaruh yang beragam. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, mengidentifikasi ada lima

faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi. Pertama, faktor individual, kedua, level rutinitas media (media routine), ketiga level organisasi, keempat, level ekstramedia yang mencakup: a) sumber berita. b) sumber penghasilan media. c) pihak eksternal, dan kelima faktor ideologi.

Untuk faktor individual, kondisi kedua perusahaan media tersebut memang relatif sama. Ini dapat ditunjukkan oleh personalia organisasi sebagai yang tergambarkan pada profil perusahaan media. Jenjang pendidikan individu di kedua media mempunyai jenjang relatif sama. Kondisi ini pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan profesionalitas di masing masing media.

Faktor rutinitas media memang telah terbentuk dan berkembang di masing-masing media artinya telah terbentuk pola/mekanisme kerja dalam proses produksi berita. Kapasitas pola/mekasime kerja di dua media tersebut jelas berbeda, dengan kecenderungan di Harian Kedaulatan Rakyat lebih besar dari harian Bernas Jogja. Hal ini berkaitan pula dengan kecenderungan proses penentuan berita yang akan diproduksi hingga ke proses cetak di masing-masing media.

Faktor organisasi tidak terlepas dengan struktur organisasi dan mekanisme perusahaan media baik itu di Harian Kedaulatan Rakyat maupun di Harian Bernas Jogja. Seperti telah disebutkan dalam ulasan faktor individual, struktur organisasi di Harian Kedaulatan Rakyat (5 unsur direksi dan 12 redaksi) lebih lengkap dan lebih besar dibandingkan di Harian Bernas Jogja (2 unsur direksi dan 8 redaksi). Akan tetapi untuk unsur-unsur organisasi perusahaan yang lain relatif seimbang, di Harian Kedaulatan Rakyat ada 5 unsur dan Harian Bernas Jogja ada 6 unsur. Dengan demikian perbedaan kedua perusahaan ini ada pada jenjang direksi dan redaksi.

Kondisi ini akan memberikan dukungan yang berbeda dalam proses pemberitaan di masing-masing media.

Faktor Ekstramedia mencakup a) sumber berita b) sumber penghasilan media c) pihak eksternal, yang masing-masing mempunyai pengaruh terhadap perusahaan media khususnya proses pemberitaan.

a. Sumber Berita, merupakan unsur faktor Ekstramedia yang tidak netral. Setiap sumber berita akan memberikan fakta secara selektif kepada wartawan, baik dari Harian Kedaulatan Rakyat maupun Harian Bernas Jogja.

b. Sumber penghasilan media, mencakup pelanggan dan pemasang iklan yang untuk setiap media belum tentu sama. Dengan demikian dukungan finansial setiap media juga cenderung berbeda. Dalam hal ini dukungan finansial pada Harian Kedaulatan Rakyat cenderung lebih besar dibandingkan Harian Bernas Jogja. Tarif langganan per bulan pada Harian Kedaulatan Rakyat (Rp 65.000,- per bulan) jelas lebih besar daripada Harian Bernas Jogja (Rp 40.000,- per bulan). Demikian pula jenis iklan di Harian Kedaulatan Rakyat (9 jenis) lebih banyak dengan tarif yang lebih besar (Rp. 10.000,-/mm klm - Rp.175.000,-ukuran1klmx45mm) dibanding Harian Bernas Jogja (Rp 6.000,- Rp 22.000,- /mmk). Dengan jumlah pelanggan dan pemasang iklan yang lebih besar maka peluang dukungan dana pada Harian Kedaulatan Rakyat memang lebih besar daripada Harian Bernas Jogja. Dengan dapat dimaklumi bahwa perbedaan dukungan finansial ini juga akan memberikan pengaruh pada proses pemberitaan di kedua media tersebut.

c. Pihak Eksternal, berpeluang pula memberikan pengaruh pada kedua media dalam proses pemberitaan. Faktor ini mencakup unsur pemerintah, kalangan bisnis, partai

politik, lembaga swadaya masyarakat dan pemuka masyarakat. Pengaruh faktor eksternal ini tergantung pada luas sempit dan kuat lemah hubungan yang terjalin dengan unsur-unsur tersebut di masing-masing media. Dalam hal ini peluang dukungan faktor eksternal pada Harian Kedaulatan Rakyat kemungkinan lebih besar dibandingkan daripada harian Bernas Jogja.

Faktor Idiologi, merupakan faktor yang erat kaitannya dengan nilai-nilai dasar dan kerangka pikir yang berkembang di lingkungan perusahaan media dan pada akhirnya berpengaruh dalam proses pemberitaan. Dalam hal ini-untuk kedua media, Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Bernas Jogja, secara praktis/ sederhana dapat dilihat pada slogan masing-masing media. Slogan Harian Kedaulatan Rakyat dengan ungkapan *Suara Hati Nurani Rakyat* sedangkan slogan Harian Bernas Jogja dengan ungkapan *Penyambung Aspirasi Warga Yogyakarta*. Dengan demikian kedua media lokal ini ingin mengekspresikan diri pada posisi dekat dengan atau bahkan sebagai bagian dari masyarakat. Keduanya ingin menyuarakan suara hati nurani atau aspirasi masyarakat, sehingga dari sisi slogan idiologi kedua media ini realtif sama.

Perbedaan cara pandang kedua media lokal ini akan lebih jelas bila dilihat dari sisi sejarah perkembangannya. Bila Harian Kedaulatan Rakyat dalam sejarahnya belum pernah meletakkan diri sebagai bagian dari idiologi partai politik maka Harian Bernas Jogja pernah menjadi bagian dari idiologi partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia yang merupakan bagian dari unsur fusi dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada saat ini PDIP pada posisi oposan terhadap partai berkuasa/pemerintah. Dengan demikian logis/wajar apabila sejarah politik media ini masih berpengaruh terhadap cara pandang mengenai program penanganan korban

bencana khususnya program pencairan bantuan dana rekonstruksi yang meletakkan pilihan masalah pemberitaan pada sisi pemerintah dengan frame *Pencairan dana rekonstruksi lamban*. Harian Kedaulatan Rakyat meletakkan pilihan masalah pada sisi masyarakat dengan frame *Harapan Masyarakat tentang kepastian dan keadilan pencairan Dana Rekonstruksi*.

Berdasarkan ulasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terhadap perbedaan frame pemberitaan Harian Kedaulatan Rakyat dan Bernas Jogja adalah faktor struktur organisasi khususnya skala kapasitas organisasi, faktor ekstramedia khususnya sumber penghasilan (pelanggan dan periklanan) dan pihak eksternal, dan faktor idiologi khususnya sejarah idiologi media.